

EVALUASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERDESAAN DALAM Mendukung PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Disusun Oleh:

NAMA : RETNO DAMAYANTI
NPM : 2141021017
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**EVALUASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
PERDESAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Disusun Oleh:

NAMA : RETNO DAMAYANTI
NPM : 2141021017
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Retno Damayanti
NPM : 2141021017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : EVALUASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
PERDESAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Judul Tesis : EVALUATION OF RURAL WOMEN'S LEADERSHIP
POLICY IN SUPPORTING VILLAGE DEVELOPMENT IN
NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Ratri Istania, S.IP, MA, Ph.D)

Pembimbing II



(Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si, Ph.D)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Retno Damayanti
NPM : 2141021017
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
EVALUASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
JUDUL TESIS : PERDESAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada;

Hari : RABU
Tanggal : 29 NOVEMBER 2023
Pukul : 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Anggota : Dr. Hamka, MA

Pembimbing 1 : Ratri Istania, S.IP, MA, Ph.D.

Pembimbing 2 : Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si., Ph.D.



[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of examiners above.]

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Damayanti
NPM : 2141021017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul “EVALUASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERDESAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Desember 2023



(Retno Damayanti)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah..., puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab. Tesis ini merupakan buah perjalanan panjang, sebuah dedikasi untuk menggali pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam Mendukung Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama proses penelitian. Oleh karena itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Papa (Alm) dan Mama yang tidak pernah putus mendoakan ananda agar segera menyelesaikan proses pendidikan ilmu magister, dan suami saya Yonas Dian Hermanu serta Hagi & Mada kedua anak saya yang selalu menjadi penyemangat, penyejuk hati dalam mengantarkan langkah-langkah peneliti menikmati segala proses peristiwa perjalanan hidup, serta tidak lupa kepada kedua dosen pembimbing yaitu Bu Ratri Istania, Ph.D dan Bu Arifiani Widjayanti, Ph.D yang telah membimbing, memberikan pandangan berharga, dan berbagi ilmu pengetahuan dalam proses pencapaian ini. Selain itu Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta jajaran dan para dosen di lingkup Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Seluruh Dewan Penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan atas perbaikan tesis ini dimulai dari seminar proposal, seminar hasil sampai dengan sidang akhir tesis yaitu, Dr. Ridwan Radjab, M.Si, Dr. Firman Hadi Rivai, MPA, serta anggota sidang tesis, Dr. Hamka, MA;

3. Pembimbing tesis yang selalu membimbing penulis saat penentuan judul, analisis permasalahan dan teori-teori yang dipakai dalam tesis ini, pembimbing I Ratri Istania, S.IP, MA, Ph.D, dan pembimbing II Arifiani Widjayanti, S.P, M.Si, Ph.D;
4. Jajaran Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
5. Jajaran Pimpinan dan Pegawai KAPAL PEREMPUAN;
6. Jajaran dan Pimpinan Pemerintah Daerah Dinas PPPA Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara;
7. Fasilitator, Ibu-Ibu Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Seluruh staf Administrasi dan staf Perpustakaan di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta, Mba Seha, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 konsentrasi Manajemen Kebijakan Pembangunan yang telah bersama-sama mengarungi kawah candradimuka selama dua tahun ini. Semoga selalu kompak sampai lulus nanti;
10. Perempuan-Perempuan Indonesia. Ide penulis bisa terwujud karena diawali dari kalian semua. "Tetap Berjuang dan Berani Bersuara !! setiap langkah kecil kita menuju kesetaraan gender adalah langkah besar bagi kemanusiaan. Mari kita terus bersatu melawan ketidakadilan. Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju".

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Matur Nuwun Sanget.

Jakarta, Desember 2023

Peneliti

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam Mendukung Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Retno Damayanti, Ratri Istantia, Afriani Widjayanti

rrdamayanti16@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan melalui pelatihan kepemimpinan perempuan, pada penelitian ini dipilih lokus di Provinsi NTB yaitu di dua wilayah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan studi kasus, serta teknik mengumpulkan data melalui teknik pengamatan, wawancara, juga telaah dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi terhadap tingkat kinerja kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini, masih ditemukan permasalahan terkait efektivitas koordinasi, kolaborasi, serta komunikasi antar pihak terutama pada pemerintah daerah. Selain itu, masih kurang efisiennya sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia. Selain itu ditemukan juga masalah perbandingan dua wilayah terkait tidak efektif dan responsivanya hasil dari persiapan dan pelatihan di Lombok Utara, hasil yang sama dalam tahap pendampingan paska pelatihan bahwa peserta Lombok Utara dinilai kurang efektif, serta ditemukan juga kurang efektivitasnya pada tahap monitoring dan evaluasi kebijakan tersebut dilaksanakan. Penelitian dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Hasil Penelitian menyimpulkan evaluasi kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang paling tepat diterapkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Alternatif Kebijakan Tim Manajemen Kolaborasi. Alternatif Kebijakan ini menekankan pada konsep kolaborasi antar pihak yang dapat bekerjasama secara efektif dalam konteks formal dan bersifat regular. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi agar lebih efektif, efisien, dan responsive sehingga mampu mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Kata Kunci: Kebijakan Kepemimpinan, Evaluasi Kebijakan, Kepemimpinan Perempuan, Gender, Perempuan Desa

ABSTRACT

Evaluation of Rural Women's Leadership Policy in Supporting Village Development in Nusa Tenggara Barat Province

Retno Damayanti, Ratri Istantia, Afriani Widjayanti

rrdamayanti16@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection issued the Rural Women's Leadership Policy through the 2020-2024 National Priority Program to improve the leadership quality of potential rural women through women's leadership training. In this study, locations were selected in NTB Province, namely in two regions, Lombok Utara Regency and Lombok Barat Regency. This research uses qualitative methods with a case study comparison approach, and techniques for collecting data through observation techniques, interviews, and documentation review. The results of research evaluation of the level of policy performance show that this program policy has been implemented quite well and can be continued, however, there are still records of shortcomings and weaknesses in this program, and problems are still found related to the effectiveness of coordination, collaboration, communication between parties, especially in local governments. In addition, there is still a lack of efficient budget and human resources. Another thing was also found to be the problem of comparison of two areas related to ineffectiveness and responsiveness of the results of preparation and training in Lombok Utara, the same results in the post-training mentoring stage that Lombok Utara participants were considered less effective, and it was also found to be less effective at the monitoring and evaluation stage of the policy implemented. The research was conducted using William Dunn's policy evaluation theory. The study results concluded that the Alternative Policy of the Collaboration Management Team is the most appropriate evaluation of rural women's leadership policies that are most appropriate to be applied in the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. Alternatives This policy emphasizes collaboration between parties who can work together effectively in a formal and regular context. The study's results are expected to provide input to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection starting from preparation, planning, implementation, mentoring, and monitoring evaluation to be more effective, efficient, and responsive to achieve the policy's objectives.

Keywords: Leadership Policy, Policy Evaluation, Women's Leadership, Gender, Village Women

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Permasalahan.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	19
C. Kerangka Berpikir	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	60
A. Metode Penelitian	60
B. Teknik Pengumpulan Data	63
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
B. Kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat	85

C. Perbandingan Kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Antara Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR TABEL

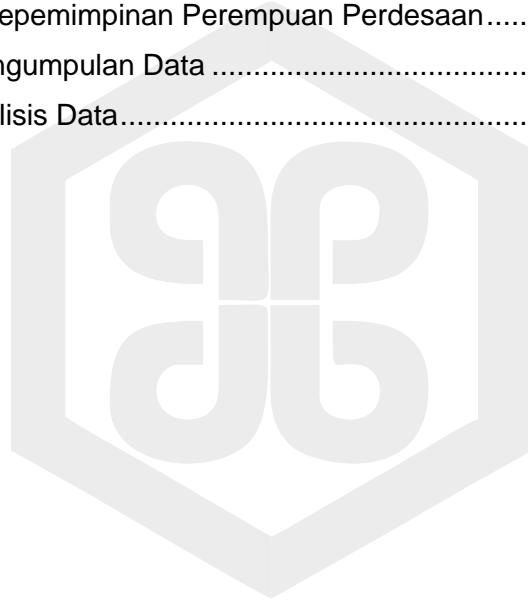
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2019	71
Tabel 4.2	Perbandingan Data Perempuan Perdesaan yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan atau Berpartisipasi dalam Bidang Politik Antara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara Tahun 2022	77
Tabel 4.3	Perbandingan Kinerja Kebijakan antara Lombok Timur dan Lombok Utara	131
Tabel 2.5	Grid Analysis dengan Tiga Kriteria Evaluasi (Skala 1-5)	140
Tabel Key Informan.....		158



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tiga Elemen Kebijakan.....	27
Gambar 2.2. Evaluasi Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.....	59
Gambar 3.1. Teknis Pengumpulan Data	63
Gambar 3.2. Model Analisis Data.....	67



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN..... 155



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip SDG's yaitu *leaving no one behind* membawa konsekuensi dipastikannya semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, dari penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) terlibat dan merasakan manfaat pembangunan. Salah satu target (*goals*) SDG's secara eksplisit dan tegas menyebutkan pentingnya setiap Negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu goals yang akan dicapai (goal ke-5). Dengan memastikan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya diperhitungkan dalam setiap proses pembangunan akan berkontribusi secara signifikan pada tercapainya tujuan akhir SDG's.

Salah satu indikator capaian pembangunan bidang kesetaraan gender di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian kemajuan Indonesia menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan, data BPS terkait IPG di Indonesia pada tahun 2019 adalah 91,07 dan turun di tahun 2020 menjadi 91,06. Pada tahun 2021, IPG Indonesia 91,27 meningkat 0,21 dibandingkan tahun 2020. Artinya, masih terjadi kesenjangan gender pada hasil pembangunan, demikian pula dengan IDG di tahun 2019 sebesar 75,24 dan pada tahun 2020 berada diangka 75,57 kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 76,26. Progress kenaikannya 0,69, hal ini patut menjadi perhatian kita semua. Data tersebut menunjukkan realita bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam politik. Padahal bidang-bidang tersebut berpengaruh langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam Sasaran Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia menargetkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,39 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 76,59. Target ini hanya dicapai jika

perempuan mendapatkan iklim budaya yang setara dan berkeadilan gender. Ruang-ruang politik terbuka bagi perempuan sehingga mempunyai posisi tawar dalam pengambilan keputusan di ranah privat maupun publik. Perempuan juga mesti dibuka aksesnya di sektor Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan berbagai perlindungan program-program perlindungan sosial.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (L.N. RI No.29, T.L.N.NO. 3277) menegaskan prinsip-prinsip non diskriminasi dan *equal right* bagi seluruh warga Indonesia, sehingga pembangunan di level manapun harus memuat prinsip tersebut termasuk pembangunan tingkat desa. Strategi pembangunan untuk mengatasi ada kesenjangan dan diskriminasi adalah Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai IPG dan IDG. Salah satu upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan IPG dan IDG adalah mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Dasar dari strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Salah satu strategi PUG di bidang politik adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat diartikan secara luas yaitu partisipasi politik dalam politik elektoral dan non elektoral. Data dari BPS menunjukkan partisipasi perempuan dalam politik dapat diukur dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative pemilu tahun 2019, masih mencapai 20,8%. Partisipasi politik perempuan non elektoral adalah keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan, misalnya dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang, bahkan pengambilan keputusan dalam keluarga.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) telah mengamanatkan pentingnya

kesetaraan gender dalam pembangunan desa. Undang-Undang tentang Desa khusus berkaitan dengan salah satu tugas kepala desa adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu arus utama (*Cross Cutting Issues*) yang harus dilaksanakan dalam pembangunan. RPJMN sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), harus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan di daerah termasuk desa. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa khusus dengan peningkatan kapasitas masyarakat yaitu kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak. Sedang penerapan PUG di daerah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Supiandi, dalam Laporan Pilot Model PPRG Desa, 2020).

Walau perempuan Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, namun tidak dipungkiri bahwa beberapa faktor pusaran budaya patriarki, norma adat, dan agama masih mengakar dengan kuat diberbagai lini kehidupan. Jane (2022) menyampaikan faktor adat, budaya dan agama memainkan peran penting dalam urusan kepemimpinan perempuan di berbagai masyarakat dan negara. Faktor adat dan budaya seperti norma-norma sosial/ norma tradisional dalam masyarakat seringkali menetapkan peran gender yang kaku, dengan harapan bahwa perempuan harus berfokus pada peran domestik. Faktor tersebut dapat menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Dalam beberapa budaya, kepemimpinan dapat diwariskan dari generasi ke generasi, dan seringkali lebih cenderung diwariskan kepada laki-laki. Diskriminasi dan stereotipe gender juga dapat mempersulit perempuan untuk diterima dalam peran kepemimpinan. Perempuan dihadapkan dengan prasangka dan resistensi.

Selain faktor adat dan budaya, tafsir agama yang berbeda-beda dapat memiliki dampak yang signifikan pada peran-peran perempuan dalam masyarakat. Maria (2009) mengemukakan bahwa beberapa tafsir agama mungkin mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan,

sementara yang lain mungkin menekankan peran tradisional yang lebih konservatif. Dalam beberapa masyarakat yang menganut hukum syariah, perempuan memiliki akses yang cukup terbatas dalam politik dan kepemimpinan. Namun, Wells (2020) menyatakan bahwa penting untuk diingat bahwa tidak semua budaya dan agama membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Ada juga budaya dan agama yang mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Di banyak negara dan masyarakat, gerakan untuk kesetaraan gender telah mendapatkan dukungan dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak perubahan positif telah terjadi. Pentingnya faktor-faktor ini tergantung pada berbagai faktor seperti budaya, agama, tradisi lokal, serta perkembangan sosial dan politik di dalam masyarakat tertentu. Upaya pendidikan, kampanye kesetaraan gender, dan perubahan hukum dapat membantu mengurangi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan.

Jumlah data Kepala Desa Perempuan dari Dinas DP3AKB di Kabupaten Lombok Timur hingga tahun 2023 hanya berjumlah 1 orang dan Kepala Desa Perempuan di Kabupaten Lombok Utara masih belum ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh tafsir agama, budaya dan tradisi di daerah setempat yang masih kuat dalam mempertahankan norma dan nilai yang mendukung dominasi laki-laki dalam struktur pemerintahan desa. Persepsi perempuan yang tidak cocok untuk memimpin atau bahwa perempuan kurang dianggap kompeten dalam urusan politik.

Kepemimpinan perempuan perdesaan padahal memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. perempuan di desa seringkali terlibat dalam sektor pertanian dan industri rumah tangga. Melalui kepemimpinan perempuan yang kuat, mereka dapat memimpin inisiatif ekonomi, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian di desanya. Kepemimpinan perempuan dapat mempromosikan pendidikan di desa, terutama pendidikan perempuan dan anak-anak. Kepemimpinan perempuan dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti kesehatan, sanitasi, dan hak-hak perempuan. Perempuan dalam kepemimpinan di desa dapat membawa perspektif yang berbeda dalam

proses pengambilan keputusan, mereka dapat ikut mempromosikan inklusivitas dan keadilan gender dalam keputusan desa yang mempengaruhi seluruh masyarakat di desa.

Pada kenyataannya di Indonesia masih menghadapi masalah tingginya kematian Ibu melahirkan, pernikahan usia anak, kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, pekerja informal tanpa perlindungan hukum, dan rendahnya partisipasi politik dalam kepemimpinan perempuan. Indonesia harus keluar dari situasi ini, dengan cara melakukan pemberdayaan perempuan untuk membangun komitmen, kesadaran kritis dan kepekaan terhadap masalah-masalah perempuan yang dialaminya sendiri maupun lingkungannya. Perlu dibangkitkan daya perempuan supaya tumbuh kepemimpinannya, memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan perubahan. Pemerintah harus memberi perhatian khusus juga untuk mereka yang hidup di pulau-pulau dan pegunungan terpencil, wilayah rawan bencana, masyarakat adat dan wilayah urban yang ada dibawah garis kemiskinan sebab kepemimpinan perempuan akar rumput perdesaan merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan (Puspayoga dalam Buku Daya Perempuan Akar Rumput, 2020). Oleh karenanya, perempuan harus terlibat berpartisipasi melalui kepemimpinan untuk dirinya, keluarganya, lingkungan di desanya.

Kepemimpinan para perempuan akar rumput perdesaan dicerminkan melalui kemampuan dan komitmen mendorong perubahan sosial, budaya, dan politik agar lebih setara dan berkeadilan gender. Sebagian dari mereka melakukannya dengan memilih jalur non formal tanpa harus masuk dalam struktur lembaga formal. Namun ada beberapa yang memilih melalui struktur formal dan mereka berhasil terpilih menjadi Ketua RT, RW, aktif dalam Musdus, Tim Penyusun RPJMDes, Delegasi Musrenbang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Gugus Tugas Penanganan Kebencanaan (Misiyah dalam Buku Daya Perempuan Akar Rumput, 2020).

Kondisi perdesaan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan kehidupan perkotaan dalam seluruh dimensi kehidupan di bidang-bidang pembangunan. Kesenjangan yang terjadi termasuk diantaranya bidang politik, terutama politik dalam konteks

kesetaraan gender. Perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di perdesaan selain jumlahnya masih rendah, juga kapasitas dan kapabilitasnya perlu untuk ditingkatkan khususnya dalam mengawal kebijakan, program, dan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa agar berperspektif Gender. Melalui pelatihan kepemimpinan perempuan potensial di perdesaan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga dapat berperan sebagai penggerak dan turut aktif dalam pengambilan keputusan di semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Rosaline dalam Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, 2021).

Di semua daerah terdapat beberapa desa dimana perempuan menjadi perangkat desa, menjadi anggota badan perwakilan desa, bahkan ada yang menjadi Kepala Desa. Hal ini antara lain terjadi karena secara pendidikan, perempuan desa memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menempuh pendidikan ke jenjang tertinggi. Itulah sebabnya mengapa saat ini kualitas pendidikan dan intelektual perempuan desa semakin baik dan relative berada pada derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan perlu memimpin karena separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, karena secara biologis, pengalaman, kebutuhannya berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu perempuan harus ikut serta dalam pengambilan keputusan dan perempuan bersama laki-laki memimpin perubahan untuk kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.

Hal ini juga dapat dilihat dari Data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan belum maksimalnya peran perempuan sebagai tenaga kerja profesional, kepemimpinan, serta sumbangan pendapatan perempuan, serta memiliki progress prosentase kenaikan yang paling rendah dibawah angka rata-rata nasional, hal ini patut menjadi perhatian kita semua. Data tersebut menunjukkan realita bahwa perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam politik. Padahal bidang-bidang tersebut berpengaruh langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu pada tahun 2021 masih dibawah angka rata-rata nasional Indonesia sebesar 90,53. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) paling rendah di seluruh Indonesia yaitu pada tahun 2021 sebesar 52,54% dan pada tahun 2020 berada di angka 51,96%. Adanya tren data dari Simfoni PPA, kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 jumlah kasus 545, tahun 2020 sebanyak 845, tahun 2021 sebanyak 1.060 kasus, dan di tahun 2022 sempat mengalami penurunan meskipun jumlahnya masih tinggi yaitu 640 kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Begitu juga data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Lombok Utara yaitu terendah di Prov NTB pada tahun 2020 sebesar 47,19% dan pada tahun 2021 berada di angka 47,22% serta data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Serta data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Lombok Timur yaitu pada tahun 2020 sebesar 65,67% dan pada tahun 2021 berada di angka 65,52%.

Kemudian data dari Dinas PPPA Kab Lombok Utara dan Lombok Timur bahwa kasus kekerasan tahun 2021 pada perempuan dan anak paling tinggi berada di Kabupaten Lombok Timur sejumlah 390 kasus, Kabupaten Lombok Barat sejumlah 140 kasus, dan Kabupaten Lombok Timur sejumlah 124 kasus. Data pernikahan usia anak dari (Susenas BPS, 2021) menyebutkan bahwa persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun di Kabupaten Lombok Timur mencapai tertinggi kedua setelah Kabupaten Lombok Tengah yaitu 20,67 % dan di Kabupaten Lombok Utara tertinggi ketiga mencapai 20,59%.

Dalam uraian latar belakang diatas, upaya untuk meningkatkan IPG dan IDG adalah dengan melaksanakan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang didasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, untuk mempercepat Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Politik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan Kapal Perempuan yaitu Lembaga

Masyarakat Pemerhati Perempuan yang memiliki jaringan basis ke daerah mengimplementasikan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas bagi perempuan potensial perdesaan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap perempuan perdesaan yang rendah akses dan kapasitasnya dalam berpartisipasi di penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan desa, dan pengelolaan desa.

Peneliti tertarik mengambil dua Kabupaten sebagai lokus penelitian yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara bertujuan ingin membandingkan dua variabel untuk mendapatkan jawaban atau fakta di lapangan apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini lebih pada membandingkan objek-objek yang serupa/ sama dan peneliti akan mencoba mengidentifikasi dari kemiripan objek tersebut sehingga secara hipotesis menghasilkan akibat yang berbeda. Seperti melihat dari data IPM, IPG, dan IDG dari kedua Kabupaten tersebut yang jika dibandingkan masih sama-sama rendah. Kemudian perbandingan pada kedua Kabupaten tersebut masih sama-sama kuat norma gendernya yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, adalah wilayah tepat untuk penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan perempuan, kemudian selain itu, wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara adalah secara administrative sama-sama berada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana wilayah tersebut ada sama-sama mendapat pelatihan/ *treatment* dari Kementerian PP dan PA dalam mengimplementasikan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan.

Berdasarkan data tersebut, peneliti akan membandingkan objek-objek yang serupa dan mengidentifikasi dari kemiripan objek tersebut sehingga secara pembuktian mekanisme di lapangan menghasilkan akibat yang berbeda di kedua wilayah tersebut.

Dalam rangka membandingkan dua wilayah yang mendapat pelatihan melalui kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan tersebut, maka tujuan dari mengimplementasikan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan

penguatan kapasitas bagi perempuan potensial perdesaan yaitu memastikan kualitas kepemimpinan perempuan perdesaan yang memiliki kesadaran kritis dan komitmen untuk mendorong perubahan desa dalam penanganan isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan. Selain tujuan tersebut kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan ingin memastikan jumlah perempuan pemimpin yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender; memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal : Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll); memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam menyusun usulan-usulan program di empat bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa khususnya RKPD Desa dan APBD Desa.

Oleh karena itu kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan apa yang sudah dipraktekkan di lingkup perdesaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur yang memang perlu mendapatkan perhatian. Dengan melihat data yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada di lapangan guna mengevaluasi kebijakan tersebut serta membandingkan dua wilayah yaitu Lombok Timur dan Lombok Utara yang dimulai dari variable yang mirip namun mengapa hasil yang didapatkan berbeda, tentunya dengan memberikan informasi dan data untuk merekomendasikan kebijakan terkait kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan potensial perdesaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah menetapkan kebijakan partisipasi perempuan perdesaan yang selaras dengan SDG's dalam mencapai goal ke-5 untuk membangun desa yang berkontribusi positif untuk perempuan dan anak di tahun-tahun selanjutnya.

Namun demikian, di dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaksanaan pencapaian tujuan untuk membangun perempuan yang secara

kapasitas mereka mempunyai potensi untuk dapat berkiprah dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya. Perempuan dan laki-laki selain memiliki hak yang sama dan dijamin oleh konstitusi UUD 1945 juga perempuan memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan laki-laki. Oleh sebab itu, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perempuan perdesaan sebagai pemimpin di desanya dan dapat mengimplementasikan pelajaran yang diperoleh untuk kemajuan desa masing-masing demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan potensial perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2020 sudah baik, tetapi jika melihat dari tujuan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas bagi perempuan potensial perdesaan dan juga dari hasil rapat evaluasi awal tahun 2021 antara Kementerian PP dan PA dengan empat Lembaga Masyarakat (KAPAL Perempuan, KPI, PEKKA, dan PPSW) yang bekerjasama dalam menjalankan kebijakan kepemimpinan Perempuan ternyata masih ada beberapa permasalahan di lapangan, menyebabkan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial perdesaan belum optimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa faktor masalah tersebut antara lain:

- Waktu dan anggaran yang terbatas, faktor ini sebenarnya sudah diantisipasi pada saat menyusun persiapan, pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan ini membutuhkan waktu enam hari. Karena hanya dilakukan dalam waktu dan anggaran terbatas maka tim fasilitator bekerja keras dalam memproses alur dan konten materi yang cukup padat dan waktu terbatas untuk menuntun peserta pelatihan dapat memahami dengan mudah dan tidak menegangkan sehingga secara

substansi tentang konsep gender, kepemimpinan perempuan dan advokasinya serta tata kelola desa dapat diintegrasikan dengan pengalaman seluruh peserta;

- Unsur kepesertaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang timpang karena ada yang sudah mengenal dan menginternalisasi perspektif gender dan ada yang sama sekali baru mengenal gender;
- Kondisi pandemi di tahun 2020 menjadi kendala, di satu sisi harus memproses pelatihan secara partisipatif, namun di sisi lain sulitnya mengingatkan peserta agar tidak melanggar protokol kesehatan terutama memakai masker dan menjaga jarak;
- Komitmen dari Dinas Pemerintah Daerah Provinsi yang kurang optimal (tidak mereplikasi kegiatan ke Kabupaten yang lain) dan kehadiran narasumber Dinas Pemda seringkali tidak sesuai dengan tema yang diberikan dan muatan penjelasan sehingga memerlukan peran fasilitator ataupun moderator dalam menyambungkan dan mengkontekskan dengan sesi-sesi, disamping waktu terbatas;
- Pemahaman atau doktrin agama yang berbeda dan budaya patriarki daerah setempat sehingga dukungan dari masyarakat setempat dan dukungan keluarga, pasangan/ suami peserta pelatihan tidak mengizinkan istrinya untuk mengikuti proses tahapan kepemimpinan perempuan;
- Tidak ada keterlibatan pemerintah kabupaten, maupun pemerintah, tokoh adat / tokoh agama yang berjenis kelamin laki-laki/ partner/ suami pada saat tahap pendampingan di level desa.
- Apabila beberapa permasalahan tersebut belum mendapat evaluasi, upaya, ataupun rekomendasi maka akan berdampak pada capaian kinerja pada Program Prioritas Nasional Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 2020-2024 kurang maksimal. Beberapa alasan tersebut mendorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan potensial perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perbandingan studi kasus dua

daerah yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur dengan mengangkat judul Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam Mendorong Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan permasalahan diajukan dengan pertanyaan:

1. Sejauh mana tingkat kinerja kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan terhadap perempuan potensial yang masih rendah akses dan kapasitasnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana bentuk rekomendasi atas kebijakan tentang kepemimpinan perempuan perdesaan di tahun-tahun selanjutnya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengukur tingkat kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan terhadap perempuan potensial perdesaan yang masih rendah akses dan kapasitasnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara;
 - b. Untuk memberikan bentuk rekomendasi atas kebijakan tentang kepemimpinan perempuan perdesaan di tahun-tahun selanjutnya.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari dilakukan penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu politik pemerintahan dan pembangunan, terutama berkontribusi pada studi gender dan kepemimpinan perempuan perdesaan. Harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan para peneliti maupun akademisi, yang sedang melakukan kajian terhadap perbandingan peran atau kualitas

kepemimpinan perempuan perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan data, informasi, serta rekomendasi kebijakan terkait kepemimpinan perempuan perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan potensial perdesaan khususnya terhadap perbandingan peran atau kualitas kepemimpinan perempuan perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah menetapkan kebijakan partisipasi perempuan perdesaan yang selaras dengan SDG's dalam mencapai goal ke-5 untuk membangun desa yang berkontribusi positif untuk perempuan dan anak di tahun-tahun selanjutnya.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

